



BUPATI BANDUNG BARAT
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI BANDUNG BARAT

NOMOR : 100.3.3.2/Kep. 2 –Bag Huk/2026

TENTANG

PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN KEPALA DAERAH
KABUPATEN BANDUNG BARAT TAHUN 2026

BUPATI BANDUNG BARAT,

- Menimbang

:

a.

bahwa dalam rangka tertib administrasi pembentukan produk hukum daerah yaitu dalam hal pembentukan peraturan kepala daerah, harus melalui tahapan fasilitasi dan harmonisasi dengan Pemerintah Daerah tingkat Provinsi, perlu dilakukan perencanaan untuk memasukkan usulan Rancangan Peraturan Kepala Daerah ke dalam Propemperkada;

b.

bahwa Propemperkada sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat

:

1.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Bandung Barat di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4688);

2.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

3.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 186);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bandung Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 5) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 8 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bandung Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2025 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 8);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2018 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 1);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Program Pembentukan Peraturan Kepala Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Program Pembentukan Peraturan Kepala Daerah Kabupaten Bandung Barat sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU ditetapkan berdasarkan usulan Perangkat Daerah dan untuk ditindaklanjuti bersama pada Tahun Anggaran 2026.

- KETIGA : Dalam keadaan tertentu dan mendesak untuk kebutuhan penyelenggaraan Pemerintah Daerah, Perangkat Daerah dapat mengajukan Rancangan Peraturan Kepala Daerah meskipun tidak termasuk dalam agenda Rencana Program Pembentukan Peraturan Kepala Daerah.
- KEEMPAT : Apabila terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan seperlunya.
- KELIMA : Kepada Perangkat Daerah pemrakarsa atau terkait langsung secara substansi dengan agenda Rencana Program Pembentukan Peraturan Kepala Daerah untuk segera mempersiapkan pembahasan Rancangan Peraturan Kepala Daerah dan berkoordinasi dengan Bagian Hukum pada Sekretariat Daerah Kabupaten Bandung Barat dan memperhatikan tahapan/mechanisme sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ngamprah
pada tanggal 2 Januari 2026
BUPATI BANDUNG BARAT,

ttd.

JEJE RITCHIE ISMAIL

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANDUNG BARAT
NOMOR : 100.3.3.5/Kep. 2 -Bag.Huk/2026
TENTANG
PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN
KEPALA DAERAH KABUPATEN BANDUNG
BARAT TAHUN 2026

RINCIAN PROGRAM PEMBENTUKAN
PERATURAN KEPALA DAERAH KABUPATEN BANDUNG BARAT TAHUN 2026

Nomor	Judul Rancangan Peraturan Kepala Daerah
1	Tambahan Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Kabupaten Bandung Barat
2	Manajemen Talenta Di Lingkungan Kabupaten Bandung Barat
3	Manajemen Kinerja Di Lingkungan Kabupaten Bandung Barat
4	Tambahan Penghasilan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Di Lingkungan Kabupaten Bandung Barat
5	Pedoman Pelaksanaan Penegakan Disiplin Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Kabupaten Bandung Barat
6	Pola Karier Di Lingkungan Kabupaten Bandung Barat
7	Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan
8	Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Urusan Administrasi Kependudukan
9	Penugasan Kepada Desa Untuk Menyelenggarakan Sebagian Urusan Administrasi Kependudukan
10	Keanggotaan, Tugas Dan Tata Cara Pembentukan Tim Penyusun Profil Perkembangan Penduduk
11	Tata Cara Pendataan Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan
12	Tata Cara Pembatalan Dokumen Pendaftaran Penduduk
13	Tata Cara Pembetulan Dan Pembatalan Akta Pencatatan Sipil
14	Tata Cara Penerbitan Kembali Register Dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil
15	Tata Cara Pelaporan Peristiwa Kependudukan Dan Peristiwa Penting Secara Daring
16	Pelayanan Dokumen Kependudukan Secara Daring Melalui Aplikasi Sidilan
17	Tata Cara Pembinaan Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan
18	Tata Cara Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan
19	Tata Cara Penjatuhan Sanksi Administratif Penyelenggar Aan Administrasi Kependudukan
20	Pedoman Pelaksanaan Monitoring Dan Evaluasi Program Dan Kegiatan Pembangunan Daerah Berbasis Elektronik Di Kabupaten Bandung Barat
21	Rencana Aksi Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan, Dan Peredaran Gelap Narkotika
22	Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat
23	Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

Nomor	Judul Rancangan Peraturan Kepala Daerah
24	Pengendalian Gratifikasi Di Lingkungan Pemerintahan Daerah
25	Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2027
26	Peta Jalan Pemajuan Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi Daerah
27	Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026
28	Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2027
29	Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2026
30	Rencana Detail Tata Ruang Wp Cikalong Wetan
31	Rencana Detail Tata Ruang Wp Lembang
32	Rencana Detail Tata Ruang Wp Padalarang
33	Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Penataan Ruang
34	Rencana Detail Tata Ruang Wp Saguling
35	Kebijakan Dan Strategi Daerah Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum (Jakstrada SPAM) Kabupaten Bandung Barat Tahun 2025–2030
36	Strategi Sanitasi Kabupaten Bandung Barat Tahun 2025–2030
37	Daya Dukung Dan Daya Tampung Lingkungan Hidup Kabupaten Bandung Barat
38	Tata Cara Pemungutan Retribusi Jasa Pelayanan Kebersihan
39	Rencana Induk Sistem Proteksi Kebakaran
40	Pencegahan Dan Penanggulangan Bahaya Kebakaran Dan Pemeriksaan Alat Proteksi Kebakaran
41	Pelimpahan Wewenang Penyelenggaraan Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
42	Rencana Umum Peneneman Modal
43	Rencana Strategis Investasi Daerah
44	Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung Di Kabupaten Bandung Barat
45	Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah
46	Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
47	Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Inspektorat Daerah
48	Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pendidikan
49	Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kesehatan
50	Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum Dan Tata Ruang
51	Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Pertanahan
52	Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja

Nomor	Judul Rancangan Peraturan Kepala Daerah
53	Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan
54	Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Sosial
55	Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Ketenagakerjaan
56	Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
57	Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Ketahanan Pangan Dan Pertanian
58	Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup
59	Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
60	Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa
61	Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perhubungan
62	Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Komunikasi Informatika Dan Statistik
63	Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perindustrian Dan Perdagangan
64	Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah
65	Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
66	Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pemuda Dan Olahraga
67	Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pariwisata, Ekonomi Kreatif Dan Kebudayaan
68	Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perikanan Dan Peternakan
69	Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Arsip Dan Perpustakaan
70	Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Riset Inovasi Daerah
71	Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Keuangan Dan Aset Daerah
72	Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah
73	Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Nomor	Judul Rancangan Peraturan Kepala Daerah
74	Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik
75	Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah
76	Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan
77	Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung Barat
78	Peta Proses Bisnis Pemerintah Kabupaten Bandung Barat
79	Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
80	Penyelenggaraan Brt Di Wilayah Kabupaten Bandung Barat
81	Penyelenggaraan Musyawarah Desa
82	Hak Kepegawaian Perangkat Desa
83	Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Bandung Barat Nomor 35 Tahun 2019 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa
84	Perubahan Atas Peraturan Bupati Bandung Barat Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Di Desa
85	Perubahan Peraturan Bupati Nomor 30 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Aset Desa
86	Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Bandung Barat Nomor 89 Tahun 2020 Tentang Pedoman Lembaga Kemasyarakatan Desa
87	Perubahan Peraturan Bupati Bandung Barat Nomor 28 Tahun 2015 Tentang Tahapan Dan Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa
88	Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa.
89	Pedoman Pengolahan Aset
90	Pengalokasian Dan Pembagian Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2026
91	Perubahan Pengalokasian Dan Pembagian Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2026
92	Pengalokasian Bagian Dari Hasil Pajak Dan Retribusi Daerah Kepada Desa Tahun Anggaran 2026
93	Perubahan Pengalokasian Bagian Dari Hasil Pajak Dan Retribusi Daerah Kepada Desa Tahun Anggaran 2026
94	Peta Batas Desa Cigugur Girang Kecamatan Parongpong
95	Peta Batas Desa Cihanjuan Rahayu Kecamatan Parongpong
96	Peta Batas Desa Cihanjuang Kecamatan Parongpong
97	Peta Batas Desa Cihideung Kecamatan Parongpong
98	Peta Batas Desa Ciwaruga Girang Kecamatan Parongpong
99	Peta Batas Desa Karyawangi Kecamatan Parongpong
100	Peta Batas Desa Sariwangi Kecamatan Parongpong
101	Peta Batas Desa Jambudipa Kecamatan Cisarua
102	Peta Batas Desa Padaasih Kecamatan Cisarua

Nomor	Judul Rancangan Peraturan Kepala Daerah
103	Peta Batas Desa Pasirhalang Kecamatan Cisarua
104	Peta Batas Desa Pasirlangu Kecamatan Cisarua
105	Peta Batas Desa Cipada Kecamatan Cisarua
106	Peta Batas Desa Kertawangi Kecamatan Cisarua
107	Peta Batas Desa Tugumukti Kecamatan Cisarua
108	Peta Batas Desa Sadangmekar Kecamatan Cisarua
109	Peta Batas Desa Batujajar Timur Kecamatan Batujajar
110	Peta Batas Batujajar Barat Kecamatan Cisarua
111	Peta Batas Desa Galanggang Kecamatan Batujajar
112	Peta Batas Desa Cangkorah Kecamatan Batujajar
113	Peta Batas Desa Selacau Kecamatan Batujajar
114	Peta Batas Desa Pangauban Kecamatan Batujajar
115	Peta Batas Desa Giriasih Kecamatan Batujajar
116	Peta Batas Desa Batujajar Timur Kecamatan Batujajar
117	Peta Batas Desa Cipatik Kecamatan Cihampelas
118	Peta Batas Desa Citapen Kecamatan Cihampelas
119	Peta Batas Desa Cihampelas Kecamatan Cihampelas
120	Peta Batas Desa Mekarjaya Kecamatan Cihampelas
121	Peta Batas Desa Mekarmukti Kecamatan Cihampelas
122	Peta Batas Desa Pataruman Kecamatan Cihampelas
123	Peta Batas Desa Situwangi Kecamatan Cihampelas
124	Peta Batas Desa Singajaya Kecamatan Cihampelas
125	Peta Batas Desa Tanjungwangi Kecamatan Cihampelas
126	Peta Batas Desa Tanjungjaya Kecamatan Cihampelas
127	Desa Persiapan Barukai
128	Desa Persiapan Mekar Kencana
129	Desa Persiapan Cihideung Hilir
130	Tata Cara Pemungutan Retribusi Bidang Pasar
131	Penanganan Anak Putus Sekolah
132	Pelaksanaan Pendidikan Anak Usia Dini 1 (Satu) Tahun Pra Sekolah Dasar
133	Peraturan Pelaksana Peraturan Daerah nomor 5 tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum bagi Masyarakat Miskin
134	Pengawasan, Pemantauan Dan Evaluasi Koperasi
135	Sistem Klasifikasi Keamanan Dan Akses Arsip Dinamis Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung Barat
136	Perubahan Atas Perbup No 3 Tahun 2025 Tentang Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Masyarakat Yang Bersumber Dari APBD
137	Pemeriksaan Pajak Daerah

Nomor	Judul Rancangan Peraturan Kepala Daerah
138	Pengawasan Pajak Daerah
139	Penagihan Pajak Daerah
140	Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 39 Tahun 2024 tentang Pengecualian Objek Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah
141	Jadwal Retensi Arsip Daerah Di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Barat

BUPATI BANDUNG BARAT,

ttd.

JEJE RITCHIE ISMAIL